**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
**BADAN STRAJAK, DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN**
Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16770
www.bsdk.mahkamahagung.go.id, setbldk@mahkamahagung.go.id

# SURAT TUGAS

Nomor : 316/BSDK/ST.KP7.1/X/2026

**Pertimbangan** :

a. Bahwa sesaat pasca diselesaikannya penyusunan rekomendasi kebijakan Tahun Anggaran 2026 maka diperlukan evaluasi hasil proses penyusunan rekomendasi kebijakan serta untuk mempertahankan mutu keluaran hasil kegiatan;
b. Bahwa selain sebagai bentuk evaluasi, kegiatan dimaksud diperlukan juga sebagai wadah konsultasi sebagai tindak lanjut berikutnya yakni advokasi rekomendasi kebijakan sehingga akan terbit sebagai kebijakan yang berdampak dan menyelesaikan isu permasalahan kebijakan;
c. Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dalam huruf a dan b maka perlu dilaksanakan Kegiatan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Kebijakan Koordinator Penyusun Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026.

**Dasar** :

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
4. Keputusan Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Nomor : 01/KM.BIN/SK.HK1.2.5/I/2026 tanggal 30 Januari 2026 tentang Penetapan Judul Rekomendasi Kebijakan beserta Koordinator dan Sekretariat Tim Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2026;
5. Keputusan Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Nomor : 02/KM.BIN/SK.HK1.2.5/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pelaksanaan Pembinaan Teknis (BINTEK) Kompetensi Inti dan Kompetensi Keahlian Analisis Kebijakan dan Analisis Hukum bagi Koordinator Penyusun Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026;
6. Keputusan Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03/KM.BIN/SK.HK1.2.5/X/2026, tanggal 8 Oktober 2026, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Kebijakan Koordinator Penyusun Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5141/SEK/SK.OT1.1/V/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2026.

**M E N U G A S K A N :**

**Kepada :**

| No. | Nama/NIP/Golongan | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Drs. Achmad Nurul Huda, M.H.<br>196801021994031003 – IV/e | Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA RI |
| 2. | Junaedi Kamaludin, S.E., M.Si.<br>197404181994031002 – IV/b | Kepala Subdirektorat Data dan Evaluasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI |
| 3. | Maulana Aulia, S.H., M.H.<br>198410012006041001 – IV/a | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI |
| 4. | Dr. Fikri Habibi, S.H., M.H.<br>198109132008051002 – IV/a | Hakim Yustisial, Kepaniteraan MA RI |
| 5. | Fathur Rizqi, S.H., M.H<br>198811182011011007 - III/d | Hakim Yustisial Badan Pengawasan MA RI |
| 6. | Astriyani, S.H., MPPM. | Tim Asistensi Pembaharuan Peradilan MA RI |
| 7. | Dr. Aria Suyudi, SH, LLM | Tim Asistensi Pembaharuan Peradilan MA RI |

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

| | | |
|---|---|---|
| 8. | Agus Sudarsono<br>523030 - Serka | Pengolah Data dan Informasi, Subbagian Rumah Tangga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI |

**Untuk** : Melakukan perjalanan dinas dalam Negeri ke Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni, Jl. Hayam Wuruk No. 36 - 37, Rt. 14/Rw. 1, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (10120) dalam rangka melaksanakan Kegiatan Evaluasi Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Kebijakan Koordinator Penyusun Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 pada tanggal 27 - 30 Oktober 2026.

Segala biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026 Nomor : 005.06.1.610378/2026 tanggal 01 Desember 2025.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 26 Oktober 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI

**Syamsul Arief**
**NIP. 197602241999031002**

Tembusan :
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Perdata MA RI;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana MA RI;
5. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Plt. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
8. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MA RI;
9. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Diklat Kumdil MA RI;
10. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Strategi Kebijakan Kumdil MA RI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.